



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIM PERUMUS PEMBAHASAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN
TINGGI PAPUA BARAT, PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU,
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN PEMBENTUKAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA**

TANGGAL 3 NOVEMBER 2021

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : 3 (tiga)
Jenis Rapat : Tim Perumus
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 03 November 2021
W a k t u : Pukul 14.21 WIB s/d WIB
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a : Pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Papua Barat, Pembentukan Pengadilan Tinggi
Kepulauan Riau, Pembentukan Pengadilan Tinggi
Sulawesi Barat, dan Pembentukan Pengadilan Tinggi
Kalimantan Utara.

Ketua Rapat : Drs. M. Nurdin, MM
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : A. Anggota :
Fisik 11 Orang, Virtual 13 Orang, dan Ijin 0 Orang
dari 80 orang anggota yang terdiri dari 9 Fraksi.

B. Undangan :

1. Menteri Hukum dan HAM RI, diwakili Dirjen PP
Kemenkumham, selaku ketua Tim Panja
Pemerintah;
2. Menteri Keuangan, yang diwakili oleh Dirjen
Anggaran;
3. Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Dirjen Plt.
Sekjen Kemendagri;
4. Menteri PAN dan RB, yang diwakili oleh Staf Ahli
Bidang Politik dan Hukum; dan
5. Sekretaris Mahkamah Agung.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Tim Perumus (TIMUS) Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dipimpin dan dibuka Ketua Rapat Drs. M. Nurdin, MM.
2. Rapat dibuka pada pukul 14.21 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU.

II. KESIMPULAN.

Rapat Tim Perumus (TIMUS) Panja Pembahasan RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Judul RUU semula RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat **menjadi** “Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara”.
2. Diktum menimbang huruf a ditambah kata “**dengan**” setelah kalimat “dan keadilan sesuai **dengan** amanat...”;
3. Diktum Menimbang huruf b, Kata **Ibukota**, menjadi “**Ibu Kota**” berlaku pada semua pasal yang menggunakan kalimat tersebut;
4. Diktum menimbang huruf c dan d tetap sesuai dengan draf RUU;
5. Diktum Mengingat tetap sesuai dengan draf RUU;
6. Pasal 1, 2, 3, 4 tetap sesuai dengan draf RUU;
7. Pasal 5 Ayat 9 (1) point b diperlukan penjelasan terkait praktik eksekusi dalam pelaksanaan normanya;
8. Pasal 5 ayat (2), (3), (4) tetap sesuai dengan draf RUU;
9. Pasal 6 tetap sesuai dengan draf RUU;
10. Pasal 7, 8, 9, 10, 11 tetap sesuai dengan draf RUU;

III. PENUTUP.

Rapat Tim Perumus Badan Legislasi terkait Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. ditutup pukul 16.06 WIB.

Jakarta, 3 November 2021
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001